

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA DI KOTA PALU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)



OLEH :

MUHAMMAD IRFAN UMAR

B111 11 429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA
JENIS GANJA DI KOTA PALU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.
314/Pid.B/2012/PN.PL.)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD IRFAN UMAR
B111 11 429**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA DI KOTA PALU

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu No.314/Pid.B/2012/PN.PI)

Disusun dan diajukan oleh

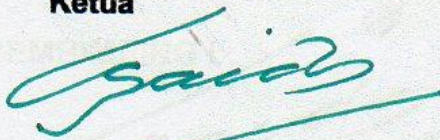
MUHAMMAD IRFAN UMAR

B111 11 429

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 26 Mei 2015
Dan Dinyatakan Diterima

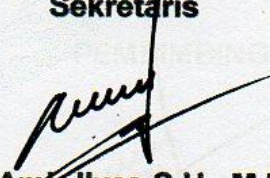
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. M.Si.
NIP. 19520711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 1961 0607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

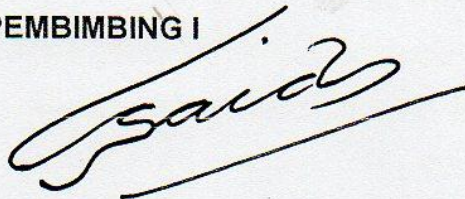
Dengan ini menerangkan bahwa dari :

Nama : **MUHAMMAD IRFAN UMAR**
No. Pokok : B111 11 429
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul / Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA JENIS GANJA DI KOTA PALU
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALU No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

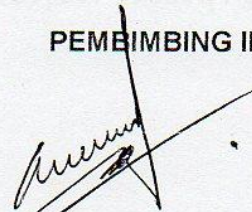
Makassar, 4 Desember 2014

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H
NIP. 19620711 198703 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

ABSTRAK

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD IRFAN UMAR**

No. Pokok : B111 11 428

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.314/Pid.B/2012/PN.PL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I.


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD IRFAN UMAR, B111 11 429, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.), di bawah bimbingan Said Karim selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Untuk itu perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih. Terlebih dahulu kepada Kedua Orang Tua penulis **Ir. H. Muhlis Abd. Umar, M.Si.** dan

Ir. Hj. Andi Erniwati, M.Si, yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada penulis sampai menyelesaikan pendidikan strata I penulis. Serta kepada saudara penulis **Muhammad Ikhwan Umar, ST** dan **Isnri Ramadhani Umar** yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan, saran, dan kritik yang membangun serta senantiasa menebarkan rasa optimis kepada penulis.

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., D.F.M. dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku penguji dan penulis juga berterima kasih atas waktu yang dapat diluangkan untuk menguji penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
6. Ketua Pengadilan Negeri Palu beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Sahabat, teman seperantauan, teman-teman tongkrongan di MR, teman-teman tongkrongan di The Panties, teman-teman di Kompleks Antang Jaya, Lalapo dan teman-teman KKN Gelombang 87 Universitas Hasanuddin Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.
8. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya teman-teman Mediasi 2011, atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Teman-teman dari SD, SMP, SMA, dan semua teman tanpa terkecuali, terimakasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2015

Muhammad Irfan Umar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Pemidanaan dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana	21
1. Tujuan Pemidanaan	21
2. Teori-Teori Pemidanaan	22
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	24
C. Tinjauan Tentang Narkotika	28
D. Tanaman Ganja	32
1. Sejarah Tanaman Ganja	32
2. Jenis-Jenis Tanaman Ganja	36
E. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Dalam	

Ketentuan Pidana	38
F. Tugas dan Wewenang Hakim Dalam Memutuskan	
Perkara Pidana	42
1. Tugas dan Wewenang Hakim	42
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	43
3. Sistem atau Teori Pembuktian	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisa Data	48
E. Definisi Operasional	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Menedarkan Narkotika Jenis Ganja Dalam Putusan	
Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/2012/PN.PL	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Dengan kemajuan teknologi dibidang media ini tentu memberikan dampak positif. Tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yaitu tindak kejahatan juga dapat bertambah karena adanya penayangan atau peliputan tindak pidana di suatu tempat dapat ditiru oleh calon pelaku tindak kejahatan di tempat lain.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan

interaksi baik antara sesama maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh Achmad Ali (2002 : 35) bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. W.L.G Lemaire (dalam PAF Lamintang, 1997 : 1) menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Rusli Effendy (1986 : 1) memberikan penjelasan tentang Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.

Sesuai dengan jiwa pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa*. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*lex certa* : undang-undang yang dapat dipercayai).

Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa Pasal 3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di bahas dalam skripsi hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Penedaran Narkotika Jenis Ganja (Narkotika Golongan I), sebagaimana yang di atur dalam Bab XV

Ketentuan Pidana Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan apabila setiap orang yang tanpa memiliki hak atau melawan hukum yang telah diatur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana yang berlaku.

Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operandi kejahatan ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis peredaran narkotika walaupun hanya sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat.

Kedua, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang-tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama (A. Kadarman, 2010 : 4).

Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia dan juga sebagai tempat produksinya narkoba itu sendiri, upaya pemberantasannya harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Walaupun kesungguh-sungguhan para penegak hukum dan para pihak yang terkait telah melakukan pemberantasan masalah tersebut dengan melihat banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskannya ke dalam penjara baik itu pemakai maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan ini berkembang pesat.

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini adalah terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam putusan nomor 314/Pid.B/2012/PN.PL. dimana majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdoronglah keingintahuan Penulis untuk mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan tersebut dengan undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?
2. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkoba jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.).
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkoba jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis,

Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *Strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama.

Bambang Poernomo (www.gsihaloho.blogspot.com, 2 September 2014, pukul 10.00 Wita) pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut definisi atau pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sementara itu Van Hammel (Rusli Effendy, 1986 : 2) memberikan rumusan sebagai berikut adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap sapa yang melanggar larangan tersebut.

Dilihat dari sudut harafiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau

een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harafiah kata *Strafbaarfeit* dapat dihukum (PAF Lamintang, 1997 : 181).

Hezewinkel Suriga (PAF Lamintang, 1997 : 190) mendefinisikan *Strafbaarfeit*, yaitu :

Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum (PAF Lamintang, 1997 : 207).

Istilah *Strafbaarfeit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld te wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma

seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang di maksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini akan di bahas secara mendalam pada bahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Simons (PAF Lamintang, 1997 : 185) telah merumuskan yaitu :

Strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dari rumusan Simons tersebut diatas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechtmatige handeling*.

Dari beberapa pandangan pakar diatas, setidaknya dalam pengertian tindak pidana tercakup didalamnya :

- a. Tindakan (komosi ataupun omisi) yang sebelumnya telah diatur oleh hukum pidana;
- b. Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui alat-alatnya;
- c. Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau bersifat melawan hukum;
- d. Pelaku dapat dipertanggung jawabkan;

Namun demikian sekedar sebagai perbandingan, Chairul Huda (2008 : 26) ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda dengan pandangan pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar pada

umumnya telah memasukan faktor kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, maka Chairul Huda justru menentang hal demikian.

Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggung jawaban pidana karenanya harus dikeluarkannya dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Apakah inkokreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh di jatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.

Pandangan yang sama dengan Chairul Huda adalah pandangan dari Marshal (Chairul Huda, 2008 : 35) :

Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsure kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukajn sesuatu (omisi).

Jauh sebelum Chairul Huda yang tidak memasukkan kesalahan pertanggung jawaban pidana sebagai dari pengertian tindak pidana, adalah Moljanto (dalam Rusli Effendy, 1986 : 47) yang menyebutkan bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan itu.

Jadi menurut Chairul Huda dan pakar-pakar yang memiliki pandangan yang sama bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana dan tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana melalui alat-alatnya.

Di dalam kepustakaan kita juga sering dijumpai perkataan-perkataan lain untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* yakni *delictum* didalam bahasa Latin, *delict* didalam bahasa Belanda, *delikt* didalam bahasa Jerman, *delit* didalam bahasa Prancis ataupun *delik* dalam bahasa Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari segi teoritik tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindakan akibat yang oleh hukum dilarang

dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakan.

Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dihendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang (Abdullah marlang, 2009 : 67).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 2005 : 10) unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kesalahan (*schuld*)

Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termaksud kedalaman yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikiranya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah (PAF lamintang, 1997 : 193), yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksejajaan (*dolus* dan *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalusaan dan lain-lain;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedence read* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 4) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persoraan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian ini yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang di sebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Yang di maksud dengan *elementen van het delict* adalah (PAF Lamintang 1996 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam

rumusan delik melainkan didalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- 1) Hal dapat dipertanggung jawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- 2) Hal dapat dipertanggung jawabkan seseorang atas tindakannya yang telah ia lakukan atas akibat yang telah ia timbulkan;
- 3) Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- 4) Sifat yang melanggar atau melawan hukum;

Hal yang mengenai dapat dipertanggung jawabkan pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena :

- 1) Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.
- 2) Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa arang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit-penyakit tertentu umpamanya pernah mendapatkan demam tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijk storing der verstandelijkmogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. (PAF Lamintang, 1996 : 197).

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan apabila (Rusli Effendy, 1986 : 134) :

- 1) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengerti harga serta nilai dari perbuatannya;
- 2) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
- 3) Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang.

Seseorang yang mabuk kerana minuman keras tidak termasuk dalam ukuran tersebut diatas karena sebelumnya ia telah mengetahui

kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras tersebut. Utrecht berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak jatuh dibawah Pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai karena tidak adanya unsur kesengajaan. Sedangkan Pompe berpendapat bahwa orang tersebut harus dikenai pidana karena ia sudah dapat menduga sebelumnya akibat-akibat pemakaian minuman keras tersebut (Rusli Effendy, 1986 : 150).

Terkait dengan pemabuk tadi, Achmad Ali (2009 : 298) bahwa harus dibedakan antara kesadaran hukum dengan ketidaktaatan hukum. Seorang pemabuk adalah orang yang sadar hukum namun bentuk kesadaran hukumnya adalah dengan tidak mentaati hukum itu. Artinya seorang pemabuk sadar bahwa perbuatan demikian adalah terlarang oleh hukuman dan membawa akibat yang juga dilarang oleh hukum namun ia tetap melakukan perbuatan demikian sehingga ia tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 KUHP dan dapat dijatuhi sanksi Pidana.

Istilah melawan hukum atau *wederrchtelij*kitu sendiri oleh berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah *wederrchtelij*kitu sebagai berikut : kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrchtelij*kitu sebagai *in strijdmet het recht* atau bertentangan dengan hukum yakni misalnya paham dari

Simons yang mengartikan sebagai *met krenking van eens anders recht* atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Sedangkan kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrichtelij* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai *zonder bovoegdheid* atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad. (PAF Lamintang, 1996 : 347).

Schaffmeister (Andi Hamzah, 2007 : 129) membedakan pengertian melawan hukum kedalam empat kelompok :

- 1) Sifat melawan hukum secara umum;
- 2) Sifat melawan hukum secara khusus;
- 3) Sifat melawan hukum secara formal;
- 4) Sifat melawan hukum secara materil;

Sifat melawan hukum secara umum maksudnya ialah semua delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian dari inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tidak ada bagian inti (*bestanddeel*) sebagai bagian inti delik karena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum.

Maksud melawan hukum secara khusus ialah yang secara tegas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian inti delik. Dengan sendirinya “melawan hukum harus tercantum didalam surat dakwaan

sehingga harus dibuktikan adanya melawan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya adalah bebas (*vrijspraak*).

Yang dimaksud melawan hukum secara formal ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum.

Sementara itu, melawan hukum secara materil mempunyai arti bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya adalah *bestanddelen van het delict* atau yang menjadi bagian inti dari delik. Bagian inti dari suatu delik adalah bagian yang secara tegas disebutkan dalam rumusan delik. Van Bammelen menjelaskan *bestanddelen* atau bagian-bagian dari inti delik itu adalah (PAF Lamintang, 1996 : 194) :

- 1) Terdapat didalam rumusan delik;
- 2) Oleh penuntut umum harus dicantumkan didalam surat dakwaan;
- 3) Harus dibuktikan didepan persidangan;
- 4) Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata lain hakim harus menjatuhkan putusan *Vrijspraak*.

B. Pemidanaan dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana

1. Tujuan Pemidanaan

Adapun tujuan pemidanaan, penulis mengemukakan dua aliran, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaiknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapatkan pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP Juli Tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dikenal tiga teori yaitu :

- 1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 :

- 11) bahwa : Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana menjatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- 2) Teori Relatif atau tujuan (Doel Theorien), berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa : Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

- 3) Teori Gabungan atau Modern (Verenings Theorien), Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan

mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku pidana dikemudian hari.

Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai dari moralitas hidup manusia individu itu (Andi Hamzah, 2009 : 45).

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam hal jenis-jenis sanksi pidana penulis merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : (Moeljatno, 1985 : 6)

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda;

b. Pidana Tambahan :

- Pencabutan hak-hak tertentu;
- Perampasan barang-barang tertentu;

- Pengumuman putusan hakim;

Berdasarkan uraian pada pasal diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Pidana Pokok

- Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

- Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. (Leden Marpaung, 2008 : 108). Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi :

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concurcus*).

- **Pidana Kurungan**

Pidana kurungan lebih ringan dari pada penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

1. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pasal pada Pasal 52.

- **Pidana Denda**

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP yang berbunyi :

1. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya

tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
6. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.
7. Pidana denda tersebut dalam dibayar siapa saja. Artinya baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- 1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang umum lainnya, ialah :
 - a) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 - b) Masuk balai tentara;
 - c) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
 - d) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 - e) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 - f) Melakukan pekerjaan tertentu;
- 2) Hakim berkuasa memecat seseorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

- Perampasan Barang-Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik

terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan boleh dirampas.
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

- **Pengumuman Putusan Hakim**

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

C. Tinjauan Tentang Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkannya sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu: (Ady Karsono, 2010 : 10)

- 1) Mempengaruhi kesadaran;
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. Penenang
 - b. Perangsang
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan serta kehilangan kesadaran mengenai waktu dan tempat).

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan , maka narkotika telah terjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi

muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Yang di maksud dengan narkotika menurut Bambang Riyadi (<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>, 13 Desember 2014, pukul 00.23 Wita) adalah candu, ganja, koakain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *heroin*, *codein*, *hesich*, *cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.

Pada masa yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkotika itu telah diorganisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.

Penyalahgunaan narkotika sekarang telah menjadi suatu persoalan bukan hanya dihadapi oleh suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika.

Menurut Moh. Taufik Makarao (2005 : 31) dalam masalah penyalahgunaan narkoba, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:

- 1) Tidak adanya keseragaman dalam pengertian narkoba;
- 2) Sanksi terlalu ringan dibandingkan akibat penyalahgunaan narkoba;
- 3) Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar;
- 4) Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana dengan narkoba.

Jenis-jenis narkoba di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada BAB III Ruang Lingkup pada pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa narkoba di golongan menjadi:

- 1) Narkoba Golongan I
- 2) Narkoba Golongan II
- 3) Narkoba Golongan III

Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh dari narkoba golongan I adalah Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Katinon, MDMA/*Ectasy*. Narkoba golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh

dari narkotika golongan II adalah Morfin, Petidin, Fentanil dan Metadon. Narkotika golongan III berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti Codein, Buprenorfin, Etilmorfin.

D. Tanaman Ganja

1. Sejarah Tanaman Ganja

Referensi mengenai tanaman ganja (cannabis) tercatat dalam naskah cina sejak awal 2700 SM. Penjelajah Eropa pertama kali memperkenalkan ganja ke dunia pada tahun 1545. Tanaman ini dianggap sangat bermanfaat oleh pemerintah kolonial Jamestown awal tahun 1607 dan mulai dibudidayakan. Di Virginia, petani didenda karena tidak mau menanam ganja. Pada tahun 1617 ganja mulai diperkenalkan ke Inggris, dari abad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh ganja dianggap sebagai obat rumah tangga yang berguna untuk mengobati penyakit seperti sakit kepala, kram menstruasi dan sakit gigi. Dari tahun 1913-1938 jenis ganja yang lebih kuat dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan obat Amerika untuk digunakan dalam produksi obat mereka. Ganja jenis itu disebut *Cannabis Americana*.

Menurut Lingkar Ganja Nasional (2011 : 3) sebelum tahun 1910, perdagangan ganja dan hasish (bagian yang dihasilkan bunga) cukup

terbatas. Namun, setelah revolusi Meksiko, perdagangan obat-obatan lebih terbuka, ini mengakibatkan pertumbuhan dan pengangkutan obat-obatan menjadi lebih mudah dan lebih menguntungkan. Bisnis ini diperluas hingga mencapai pelabuhan New Orleans, dimana waktu itu ganja dijual di pasar gelap untuk penduduk lokal. Tak lama kemudian tren penggunaan ganja sebagai obat menjadi populer.

Ganja segera menjadi populer terutama pada turunan ganja yang kuat seperti: hasish, charas dan bhang. Para musisi mengatakan bahwa merokok ganja dapat memberikan mereka inspirasi yang dibutuhkan untuk memainkan musik mereka. Ada yang mengatakan bahwa ganja bisa memberi mereka visi kontemplatif dan perasaan kebebasan dan semangat yang luar biasa. Selain itu ganja juga di gunakan sebagai obat penghibur atau *entertainment*. Akhirnya penggunaan ganja, alkohol dan obat-obatan yang lain menjadi lazim di kota-kota besar di seluruh dunia, seperti Chicago, New York, London dan Paris.

Banyak entertainers dan musisi Jazz pada jaman itu yang menggunakan narkoba dan alkohol dan mereka sangat tergantung pada gangster (bandar narkoba) saat mereka manggung. Para gangster ini mampu memberikan obat dan alkohol untuk para pemain dan staf mereka secara gratis. Di tahun 1920, sebagai hasil dari amandemen yang melarang penggunaan minuman beralkohol (Prohibition), penggunaan ganja sebagai obat psikoaktif mulai tumbuh. Bahkan setelah

pencabutan larangan tersebut tahun 1933, ganja masih digunakan secara luas, seperti juga morfin, heroin dan kokain, pada tahun 1937, ke 46 negara bagian US melarang penggunaan ganja bersama obat-obatan narkotika lainnya. Akan tetapi persepsi yang populer adalah ganja tidak adiktif seperti narkotika. Ganja diklasifikasikan sebagai obat yang mengubah suasana hati, persepsi dan *image*, bukan sebagai obat narkotika. Ganja masih dianggap sebagai obat-obatan *Schedule I*, yang berarti ganja dianggap sebagai obat yang berbahaya tanpa ada penggunaan medis. Akhirnya setelah rancangan UU diusulkan untuk kembali mengklasifikasikan ganja sebagai obat *Schedule II*, yaitu sebagai obat berbahaya dengan penggunaan medis terbatas.

Pada tahun 1960-an ganja digunakan secara luas oleh generasi muda dari semua kelas sosial. Diperkirakan bahwa pada tahun 1994, 17 juta orang Amerika telah menggunakan ganja dan sekitar 1,5 juta orang Amerika telah menghisap ganja secara teratur. Kehadiran strain ganja yang lebih kuat telah memperluas perdebatan antara penegak badan pengawas obat dan para pendukung dekriminalisasi ganja. Mereka berpendapat, ganja tidak dalam kelas yang sama seperti obat-obatan lain yang memang lebih adiktif. Pendapat yang lain menyatakan bahwa ganja adalah pintu gerbang “*gateway*” untuk obat-obatan yang lebih keras dan karena itu hukum terhadap penggunaan dan distribusi harus tetap berlaku.

Sejak tahun 1976 undang-undang memungkinkan penggunaan ganja secara terbatas untuk keperluan medis (*Medical Marijuana*) yang telah diberlakukan di 35 negara bagian (pada tahun 2003 beberapa undang-undang tersebut telah berakhir atau secara khusus diperpanjang oleh legislator negara bagian). Pada tahun 2002 ada upaya luas untuk dekriminialisasi penggunaan ganja di Kanada dan Britania Raya. Di Amerika Serikat, hampir semua negara level di tingkat negara bagian mereformasi hukum obat-obatan yang dianggap tidak efektif dengan melakukan *over-riding* pada hukum obat federal. Meskipun demikian, sejak tahun 1996 delapan negara bagian telah memberlakukan upaya hukum yang secara efektif memungkinkan penggunaan *medical marijuana* yang terbatas dan terkendali. Akan tetapi di beberapa negara bagian tersebut, dokter dan pasien *medical marijuana* kemungkinan masih menghadapi tuntutan pidana federal.

Pada bulan Mei tahun 1999, *National Institute of Health* (NIH) mengeluarkan kebijakan yang menggambarkan perlunya penelitian lebih lanjut dalam penggunaan ganja untuk perawatan medis. NIH berpendapat bahwa penggunaan ganja untuk alasan medis harus melibatkan analisa mengenai manfaat penggunaan serta potensi risiko yang akan timbul.

Sejumlah inisiatif legalisasi ganja, mulai dari legalisasi untuk penggunaan pribadi terbatas sampai kemungkinan para petani untuk

menanam ganja yang menghasilkan non-psikoaktif ganja telah ditolak oleh para pemilih dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan November tahun 2002, tiga proposal reformasi yang diusulkan di Nevada, South Dakota dan Arizona dikalahkan oleh pemilih di negara-negara bagian tersebut. Para pendukung legalisasi ganja mengutip resolusi “tidak mengikat” di San Fransisco dan Massachusetts yang mendorong pemerintah lokal dan legislator negara untuk mengembangkan strategi dekriminalisasi sebagai bukti kepentingan masyarakat dalam mereformasi ganja. Para pendukung reformasi hukum ganja juga terus menegaskan bukti jajak pendapat yang menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung legalisasi ganja dan keperluan medis.

2. Jenis-Jenis Tanaman Ganja

Ganja atau *Cannabis* terdiri dari tiga spesies, yaitu *Cannabis Indica*, *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Ruderalis*. Perbedaan ketiga spesies *cannabis* ini bisa dilihat dari ukuran tinggi pohonnya. *Cannabis Ruderalis* mempunyai tinggi pohon paling pendek diantara dua jenis *cannabis* lainnya dan sangat sedikit memproduksi THC (*tetrahydrocannabinol*).

Cannabis Sativa relatif paling tinggi (mencapai 4,5 meter) dengan ruas daun paling panjang dan bercabang, sedangkan *Cannabis Indica* memiliki tinggi pohon yang lebih pendek dari *Cannabis Sativa* dan lebih tinggi dari *Ruderalis*. *Cannabis Indica* memiliki daun yang lebih lebar dan

sering ditanam orang di dalam ruangan (*indoor*). Pertumbuhan *Sativa* lebih lama di bandingkan *Indica*, biasanya satu atau dua bulan lebih lama untuk tumbuh menjadi dewasa. Efek psikoaktif dari *Sativas* dan *Indicas* berbeda, namun perbedaan rasio *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD) di sebagian besar varietas dari kedua jenis ini sama, yaitu rata-rata sekitar 200:1. Varietas *cannabis* yang paling kuat yaitu jenis *Indica Landraces* yang merupakan campuran dari beberapa spesies dengan resio THC/CBD yang beragam, *Cannabis* dengan kadar THC dan CBD yang tinggi dapat mengatasi insomnia. *Indica Landraces* banyak ditemukan di daerah asia seperti Afghanistan dan Pakistan.

Selain jenis *Sativa*, *Indica* dan *Ruderalis* yang ditanam secara murni, ada juga varietas hibrida dengan rasio ketiga jenis tanaman tersebut. Misalnya, hibrida *White Widow* konon memiliki perbandingan genetika antara 60% "Indica" dan 40% "Sativa". Varietas hibrida memiliki kombinasi sifat-sifat yang berasal dari kedua "orang tua" mereka. Ada juga persilangan hibrida yang terdiri dari campuran keduanya, *ruderalis* dan *indica* atau gen *sativa* (hibrida jenis ini biasa di sebut *autoflowering* varietas). "*Lowrider*" adalah jenis hibrida *autoflowering* yang paling terkenal dan memiliki karakteristik dari *autoflowering cannabis ruderalis* yang dapat memproduksi THC dan CBD dalam jumlah yang cukup untuk dimanfaatkan. Varietas ganja *autoflowering* dianggap menguntungkan oleh beberapa petani karena ukurannya yang kecil, tumbuh lebih cepat

dan tidak bergantung pada perubahan waktu pergantian cahaya/sinar untuk dapat berbunga. (<http://indoganja.com/2013/03/keluarga-cannabis-sativa-indica.html>, 15 Desember, 04:12 Wita).

E. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Dalam Ketentuan Pidana

Secara gairis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Penanaman.** Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, di kenakan ketentuan pidana:
 - a. Golongan I. Diancam pidana paling singkatt empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).
 - b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (pasal 117).
 - c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta

rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (pasal 122).

- 2) **Pengedaran.** Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan II. Dikenakan ketentuan pidana:
- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);
 - b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
 - c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
 - d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

3. **Sebagai Produsen.** Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan denda pidana:
- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113);
 - b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118);
 - c. Golongan III. Dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123);
4. **Penggunaan.** Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana:

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116);
 - b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121);
 - c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).
5. **Prekursor Narkotika.** Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh. Denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 129)

F. Tugas dan Wewenang Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

1. Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai tugas dan wewenang antara lain : (R.Soesilo, 1996 : 28-193).

- a) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3, dan Pasal 26 ayat 1 KUHAP).
- b) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).
- c) Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).
- d) Menentukan sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
- e) Mengerluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 175 KUHAP).
- f) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga

menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat 3 huruf b KUHAP)

- g) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangkan, baik atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
- h) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan didepan pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan hakim diantaranya :

- a) Putusan bebas, dalam hal ini terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat kesalahan dalam perbuatan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
- b) Putusan lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana.

- c) Putusan pemidanaan, dalam hal ini terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. (Andi Hamzah, 2006 : 286).

3. Sistem atau Teori Pembuktian

- a) Berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*);

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang-undang.

- b) Berdasarkan keyakinan hakim melulu;

Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa

terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. (Andi Hamzah, 2006 : 248).

- c) Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction raisonne*);

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dapat dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijewettelijk bewijsthorie*). (Andi Hamzah, 2006 : 249).

- d) Berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*);

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negative. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Kantor Pengadilan Negeri Palu atau wilayahnya hukum Pengadilan Negeri Palu. Alasan bahwa sesuai judul penulis yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja Di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)”.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja, khususnya Hakim yang menangani kasus ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang mengenai kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, yaitu hakim di Pengadilan Negeri Palu yang memutus perkara ini.

2. Teknik Kepustakaan

Yaitu suatu teknik penelaan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang

terkait dengan tindak pidana ini serta penelaan beberapa literatur yang relavan dengan materi yang dibahas.

D. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba jenis ganja di Kota Palu.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Palu.
3. Kasus adalah tindak pidana mengedarkan narkoba golongan I jenis tanaman (Ganja) di Kota Palu.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan lainnya.
5. Mengedarkan narkoba adalah suatu perilaku yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menedarkan Narkotika Jenis Ganja Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Roy Priyanto Als. Oi
Tempat Lahir	: Palu
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 21 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Tombolotutu No. 25, Kelurahan Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa memperoleh satu bungkus daun ganja dari Jakarta atas pesanan Hendra, maka pada tanggal 24 Mei 2012 terdakwa dengan menumpang kapal laut membawa daun ganja tersebut dari Jakarta menuju Makassar, selanjutnya terdakwa membawa daun ganja itu dari Makassar menuju Palu dengan menumpang mobil Bus.

Setelah terdakwa sampai di Palu, satu bungkus daun Ganja tersebut terdakwa serahkan kepada Hendra, kemudian satu bungkus daun ganja tersebut dibagi 4 (empat) linting menggunakan kertas warna putih, 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik bening transparan dan satu bungkus dengan kertas warna putih oleh Hendra. Selanjutnya 4 (empat) linting yang menggunakan kertas waarna putih tersebut oleh terdakwa dijual dan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya, namun orang tersebut mengaku sebagai teman Hendra dengan harga Rp. 50.000,-.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Dit. Res. Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap terdakwa dirumah Hendra di jalan Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan, Kota Palu karena laporan dari masyarakat, bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan terhadap pengedar narkoba jenis ganja yang dibacakan pada persidangan di hakim tunggal Pengadilan Negeri Palu yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Roy Priyanto als. Oi, secara bersama-sama dengan Hendra (belum tertangkap) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam waktu 2012, bertempat di jalan Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat di area Pengadilan Negeri Palu, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa daun ganja seberat 3,5550 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh satu bungkus daun ganja tersebut di Jakarta, kemudian atas pesanan Hendra. Maka pada tanggal 24 Mei 2012 terdakwa dengan menumpang kapal laut membawa daun ganja tersebut dari Jakarta menuju Makassar, kemudian selanjutnya terdakwa membawa daun ganja itu dari Makassar menuju Palu dengan menumpang Bus.
- Setelah terdakwa sampai di Palu satu bungkus daun ganja tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Hendra, kemudian oleh Hendra satu bungkus daun ganja tersebut dibagi 4 (empat) liting menggunakan kertas warna putih, 3 (tiga) paket dibungkus dengan

- plastik bening transparan dan satu bungkus dengan kertas warna putih.
- Selanjutnya 4 (empat) linting yang menggunakan kertas warna putih tersebut oleh terdakwa dijual dan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya, namun kepada terdakwa mengaku sebagai teman Hendra dengan harga Rp. 50.000,-.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Atas perbuatan tersebut terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Alat Bukti dan Barang Bukti

a. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Dalam Persidangan

Adapun keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi 1 : Ahmad Syawaludin

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dalam perkara ini baru kemudian saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng yang menangkap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012, sekitar jam 20.00 wita di Jl. Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu, Kota Palu;
- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pada waktu dirumah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa, karena adanya laporan masyarakat tersebut, maka terdakwa adalah merupakan bagian dari Target Operasi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;
- Bahwa, saksi bersama teman saksi lainnya sesama anggota kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan pembelian terselubung terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng, melakukan pemeriksaan/penggeledahan di rumah tersebut kemudian di temukan 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kamar tempat terdakwa ditangkap dan karena terlihat membuang sesuatu ke samping rumah, maka disamping itu juga ditemukan ditanah kosong sebelah kiri rumah tepat terdakwa ditangkap 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;
- Bahwa, saksi bersama anggota polisi lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
-

b. Saksi 2 : Johar Moidadi

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dalam perkara ini baru kemudian saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng yang menangkap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012, sekitar jam 20.00 wita di Jl. Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu, Kota Palu;
- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pada waktu di rumah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, karena adanya laporan masyarakat tersebut, maka terdakwa adalah merupakan bagian dari Target Operasi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;
- Bahwa, saksi bersama teman saksi lainnya sesama anggota kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan pembelian terselubung terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng, melakukan pemeriksaan/penggeledahan di rumah tersebut kemudian di temukan 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

ditemukan dalam kamar tempat terdakwa ditangkap dan karena terlihat membuang sesuatu ke samping rumah, maka disamping itu juga ditemukan ditanah kosong sebelah kiri rumah tepat terdakwa ditangkap 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;

- Bahwa, saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi membawa surat perintah;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut;

c. Saksi 3 : Marten

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dalam perkara ini baru kemudian saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng yang menangkap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012, sekitar jam 20.00 wita di Jl. Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu, Kota Palu;
- Bahwa, saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pada

waktu di rumah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa, karena adanya laporan masyarakat tersebut, maka terdakwa adalah merupakan bagian dari Target Operasi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;
- Bahwa, saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pembelian terselubung terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan anggota polisi dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng, melakukan pemeriksaan/penggeledahan di rumah tersebut kemudian di temukan 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap dan karena terlihat membuang sesuatu ke samping rumah, maka disamping itu juga ditemukan ditanah kosong sebelah kiri rumah tepat terdakwa ditangkap 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;
- Bahwa, saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan saksi membawa surat perintah;
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut;
- d. Selanjutnya keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari rabu tanggal 30 mei 2012 sekitar jam 20.00 wita di rumah Hendra di jalan Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 - Bahwa pada saat ditangkap barang yang ditemukan adalah 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap dan dari tanah kosong samping kiri rumah ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;
 - Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut di Jakarta atas pesanan dari Hendra, kemudian pada tanggal 24 Mei 2012 terdakwa dengan menumpang kapal laut membawa daun ganja tersebut dari Jakarta ke Makassar, kemudian dengan menumpang Bus dari Makassar ke Palu;

- Bahwa sesampai di Palu, daun ganja tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Hendara, yang kemudian Hendra membagi daun ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting, 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik bening transparan dan 1 (satu) bungkus dengan kertas warna putih;
- Bahwa 4 (empat) linting daun ganja menggunakan kertas putih tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya namun kepada terdakwa orang tersebut mengaku sebagai suruhan Hendra dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Hendra;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sangat menyesaal dengan kejadian ini dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kembali;

b. Alat Bukti Surat

Selanjutnya bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

- Hasil Laporan Pemeriksaan/Pengujian Balai POM Palu Nomor PM.01.05.1041.06.12.1060 tanggal 20 Juni 2012 yang ditanda

tangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Drs. Darma, Apt., MPPM dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berdasarkan hasil analisis pengujian adalah merupakan ganja;

- Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

c. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) Daun Ganja Kering seberat 0.983 gram yang terdiri dari :
 - 2) 4 (empat) linting daun ganja kering siap pakai terbungkus dengan kertas warna putih;
 - 3) 3 (tiga) paket ganja kering yang terbungkus dengan plastik bening transparan;
 - 4) 1 (satu) linting daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna putih;
 - 5) Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, ternyata saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa oleh anggota Polisi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Roy Priyanto Als. Oi, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi (tiga orang saksi), keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk mengedarkan (menjual) narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan primair) atau pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan subsidair).
Maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan dalam surat dakwaan No.
Reg. Perkara : PDM- /PL/11/2011 tanggal 13 Agustus 2012.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memeutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Roy Priyanto Als. Oi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Priyanto Als. Oi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) linting daun ganja kering siap pakai yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,8262 gram.
 - b. 3 (tiga) paket daun ganja kering dalam plastik warna bening transparan dengan jumlah keseluruhan 1,3889 gram.
 - c. 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 0,3389 gram.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menggunakan bentuk dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang sah yang telah dihadapkan didepan persidangan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan, maka Hakim dengan ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Roy Priyanto Alias Oi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Roy Priyanto alias Oi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a 4 (empat) linting daun ganja kering siap pakai yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,8262 gram.
 - b 3 (tiga) paket daun ganja kering dalam plastik warna bening transparan dengan jumlah keseluruhan 1,3889 gram.
 - c 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 0,3389 gram.
 - d 6 (enam) bungkus plastik bening transparan.dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, diana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana engaktualisasikan dengan baik didunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jenis dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Akan tetapi penulis melihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengakui secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam transaksi jual beli dan turut bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut dengan seseorang yang bernama Hendra yang belum tertangkap, hal ini juga diakui oleh saksi-saksi yang merupakan anggota dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng.

Berdasarkan analisis penulis bahwa penerapan dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis dinilai kurang tepat. Karena pada dakwaan primair tentang unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada diri terdakwa. Karena dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang peredaran Narkotika Golongan I dan tidak mengatakan terkhusus pada bentuk tanaman atau bukan tanaman, sedangkan terdakwa mengakui adanya transaksi dengan seseorang yang mengaku sebagai suruhan Hendra yang oleh terdakwa diserahkannya 4 (empat) linting daun ganja yang menggunakan kertas putih dan oleh orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk kemudian diserahkan kepada Hendra.

Sehingga penulis tidak setuju dengan penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang menerapkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa. Dan karena terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang sah sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana diatur dalam KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/2012/PN.PL

1. Pertimbangan Hakim

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ialah :

- Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, yaitu berupa : hasil laporan pemeriksaan/pengujian Balai POM Palu Nomor PM.01.05.1041.06.12.1060 tanggal 20 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Drs. Darman, Apt., MPPM;
- Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;
- Hakim mempertimbangkan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

- Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;
- Hakim mempertimbangkan bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, ternyata saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa oleh anggota Polisi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;
- Hakim mempertimbangkan bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;
- Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat merumuskan fakta-fakta hukum;
- Hakim mempertimbangkan bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Hakim mempertimbangkan bahwa selama dipersidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak doketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum;
- Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara subsidairis yaitu :
 - Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
 - Subsidair : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dapat dipertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu diperimbangkan lagi dengan mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairis;
- Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a) Unsur “setiap orang”;

- b) Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - c) Unsur “secara bersama-sama”;
- Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terpenuhinya dakwaan primair, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dengan demikian terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a) Unsur “setiap orang”;
 - b) Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - c) Unsur “secara bersama-sama”;
- Hakim mempertimbangkan bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangannya, semua unsur-unsur dalam pasal 111 dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuhtinya perbuatan terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah tidak tepat dikarenakan pada diri terdakwa tidak terbukti melakukan transaksi atau pendistribusian Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim

kualifikasi tindak pidana yang diterapkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

- Hakim mempertimbangkan bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus peertanggung jawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
- Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Hakim mempertimbangkan bahwa karena terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
- Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;
- Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa;
 - a) Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang berusaha memberantas peredaran gelap narkotika;
 - b) Hal-hal yang meringankan : terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

2. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan

terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang menurut Hakim salah satu unsur yang ada didalam pasal tersebut tidak terpenuhi dan kemudian Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan menurut Hakim telah sesuai dan patut untuk diterapkan kepada terdakwa dan harus didasarkan pada fakta persidangan.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini yaitu R. Yoes Hartyarso, SH., MH. pada tanggal 30 Januari 2015 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan menerangkan bahwa :

"Dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ini, seorang Hakim harus memperhatikan unsur-unsur apa saja yang ada dalam pasal seperti pasal yang di

dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga fakta-fakta hukum apa saja yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, barang bukti dan berbagai macam pertimbangan lainnya termasuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri dan perbuatan terdakwa.”

Penjatuhan pidana dalam perkara ini Hakim memutuskan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Adapun Hakim memutus lebih rendah dari tuntutan Jaksa karena Hakim mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur yang ada dalam dasar hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil.

Menurut penulis, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara ini harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyebutkan adanya transaksi jual beli dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Dan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair

Jaksa Penuntut Umum tidak dituliskannya terkhusus pada narkoba golongan I bukan tanaman ataupun jenis tanaman. Maka seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencerah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana juga suatu tindak pidana harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepiantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas tindak pidana dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL menurut penulis mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal

114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ini penulis harapkan agar Majelis Hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada terdakwa.
2. Peranan Polisi dalam tahap prnyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak kejahatan karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Acmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

----- . 2009. *Menguak Teori Hukum Legal (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Effendy, Rusli. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Makassar : LEPPEN-UMI.

Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sinar Gratifika. Jakarta.

----- . 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Press.

Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Karsono, Ady. 2010. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung : Mandar Maju.

Lamintang, PAF. 1996. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

----- . 1997. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Lingkar Ganja Nasional. 2011. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta : Kompas Gramedia Group.

Marlang, Abdullah, dkk. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar : AS Center.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Gratifika.

Zainal Abidin. 2005. *Hukum Pidana*, Jakarta : Prapanca

Daftar Undang-Undang :

1. Moeljatno. 1985. KUHP. Jakarta : Bumi Aksara.
2. Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kementar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor : Politea.
3. Soerodibroto, Soenarto. 2007. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Rajawali Press.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Internet :

1. www.gsihaloho.blogspot.com
2. www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html.
3. www.indoganja.com/2013/03/keluarga-cannabis-sativa-indica.html.